

Wagub Sulteng Buka Isbat Nikah, 62 Pasangan Kini Miliki Legalitas

SULTENG RAYA – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, membuka kegiatan Isbat Nikah dan Khitanan Massal yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah di Gedung Pogombo Palu, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Baznas Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pengadilan Agama Kota Palu, Kementerian Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan Isbat Nikah dan Khitanan Massal memiliki makna yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi keluarga.

“Isbat Nikah bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut

perlindungan hukum bagi keluarga, kepastian status anak, serta penguatan ketahanan rumah tangga. Dengan adanya legalitas pernikahan, maka hak-hak keluarga dapat terlindungi secara baik oleh negara,” tegas Wagub.

Ia juga menegaskan bahwa masih banyak masyarakat yang telah menikah secara agama, namun belum tercatat secara hukum negara sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh berbagai hak administrasi dan layanan sosial.

“Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini, se-



WAKIL Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, membuka kegiatan Isbat Nikah dan Khitanan Massal yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah di Gedung Pogombo Palu, Selasa (12/5/2026). **FOTO: IST**

hingga masyarakat yang belum memiliki buku nikah dapat memperoleh legalitas resmi dan hak-haknya bisa terpenuhi dengan baik,” katanya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen membangun daerah tidak hanya dari sisi infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pembangunan mental, spiritual, dan sosial masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Wagub juga memperkenalkan layanan pengaduan masyarakat melalui Command Center “Berani Samporoa” yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ia menyampaikan bahwa masyarakat kini dapat menyampaikan keluhan maupun aspirasi secara langsung melalui layanan WhatsApp di nomor 0811-666-2222 sebagai bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat.

Baca **WAGUB** Hal. 7

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan Libur Nasional Kenaikan Yesus Kristus, maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa Harian Sulteng Raya **TIDAK TERBIT** pada Hari Kamis, 14 MEI 2026. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali pada edisi Jumat, 15 MEI 2026.

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan pemaklumannya, kami ucapkan banyak terimakasih.

Redaksi Sulteng Raya

PEMKAB DONGGALA

Tingkatkan Pendidikan Melalui Transformasi Digital



BUPATI Donggala Vera Elena Laruni (tengah) dalam melakukan penandatanganan kerja sama dengan Google Indonesia untuk transformasi pembelajaran digital di Donggala, Selasa (12/5/2026). **FOTO: ANTARA/HO-DISDIKPORA DONGGALA**

SULTENG RAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Sulawesi Tengah mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah itu melalui transformasi digital.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Donggala Ansyar Sutiadi mengatakan pentingnya penggunaan fitur pembelajaran seperti Google for Education untuk akselerasi pendidikan bermutu di Donggala.

Baca **TINGKATKAN** Hal. 7

Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar, Bupati Parmout Digugat Lewat Somasi

SULTENG RAYA – Riak persoalan proyek pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Parigi Moutong akhirnya pecah ke ruang hukum. Proyek yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 ini kini menyeret nama Bupati Parigi Moutong bersama sejumlah pejabat daerah setelah dilayangkan somasi oleh kuasa hukum penyedia jasa.

Somasi tersebut dikirim Kantor Hukum Dr. Oskar Sahim Matompo, SH, MH,



GEDUNG perpustakaan Kabupaten Parigi Moutong yang telah selesai dikerjakan oleh penyedia jasa. **FOTO: ASLAN LAEHO**

CLA & Rekan pada 6 Mei 2026 di Palu. Tak hanya ditujukan kepada Bupati, surat itu juga dialamatkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong.

Di balik somasi itu, tersimpan sengketa yang disebut berkaitan dengan dugaan wanprestasi, indikasi penyalahgunaan kewenangan, hingga perbuatan melawan

Baca **PROYEK** Hal. 7

KEMBANGKAN TEKNOLOGI HIJAU

PLTS Kawasan IMIP Bakal Bangun Kapasitas 200 MWp



AKTIVITAS di sekitar PLTS kawasan IMIP. **FOTO: IST**

SULTENG RAYA – Dalam mendukung program Pemerintah Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat melalui berbagai program strategis, terutama transisi energi fosil ke energi terbarukan (EBT), perusahaan-perusahaan yang berada dalam kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terus menerapkan prinsip

Baca **PLTS** Hal. 7

DPRD SULTENG

Finalisasi Ranperda Jalan Khusus Tambang dan Perkebunan



KOMISI III DPRD Sulteng menggodok ranperda penyelenggaraan penggunaan jalan khusus untuk hasil pertambangan dan hasil perkebunan. **FOTO: HUMAS DPRD SULTENG**

SULTENG RAYA – Komisi III DPRD Sulteng yang ditugaskan menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Hasil Perkebunan seolah tak mengenal jeda.

Baru saja kembali dari agenda studi komparatif di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat sore (8/5/2026), jajaran Komisi III langsung kembali “ngegas” membahas regulasi yang dinilai mendesak demi melindungi kepentingan masyarakat dan infrastruktur daerah.

Di bawah komando Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Dandy Adhi Prabowo, pembahasan Ranperda tersebut bergerak cepat dan intensif. Bahkan, tanpa menunggu hari kerja, rapat lanjutan kembali digelar pada Minggu siang (10/5/2026) .

Baca **DPRD SULTENG** Hal. 7

Pengprov PBSI Sulteng Periode 2025-2029 Resmi Dilantik



USAI DILANTIK, Pengprov PBSI Sulteng foto bersama dengan Ketua Umum, PP PBSI M. Fadil Imran di Ruang Serba Guna Pelatnas Cipayung, Selasa (12/5/2026). **FOTO: HUMAS PBSI SULTENG**

SULTENG RAYA – Pengurus Provinsi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sulawesi Tengah masa bakti 2025-2029 dilantik oleh Pengurus Pusat PBSI bersama 12 Pengprov lainnya, Selasa (12/5/2026) di Ruang Serba Guna Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur.

Jajaran Pengprov PBSI Sulawesi Tengah yang dilantik yakni Ketua Umum Ir Gufran Ahmad, Sekretaris Umum Saiful Pangesa, Bendahara Umum Ricky Tjui, Wakil Ketua Umum Devin Lahardi dan H Anton.

Pelantikan dipimpin

langsung Ketua Umum PP PBSI M. Fadil Imran dan diikuti 13 Pengprov PBSI yang telah melaksanakan Musprov, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bengkulu, Kalimantan Timur, Papua Pegunungan, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Banten, dan Sumatera Utara.

Setelah pelantikan Pengprov PBSI Sulteng juga melakukan pertemuan dengan Sigit Budiarto dari pihak

Baca **PENGPROV PBSI** Hal. 7

Dugaan Penghinaan, Rian Polisikan drg Herry

SULTENG RAYA - Wartawan media Global Sulteng, Rian Afdhal Hidayat, resmi melaporkan dugaan penghinaan yang dilakukan oleh drg. Herry Mulyadi ke Polresta Palu, Selasa (12/5/2026). Hal itu tertuang dalam nomor polisi, LP/B/560/V/2026/SPKT/Polresta Palu/Polda Sulteng tertanggal 12 Mei 2026. Saat melapor, Rian didampingi Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tengah bersama sejumlah organisasi pers di Sulteng.

Laporan itu berkaitan dengan dugaan penghinaan yang diterima Rian saat menjalankan tugas jurnalistik melakukan konfirmasi terkait pedoman teknis pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan di RSUD Undata Palu.

Koordinator KKJ Sulteng, Moh Arief, menyatakan ucapan yang dilontarkan pejabat publik kepada jurnalis tersebut merupakan bentuk krisis etika di ruang publik dan tidak dapat dibenarkan. "Pejabat publik tidak boleh merendahkan jurnalis yang sedang menjalankan tugas. Jika tidak sepakat dengan pertanyaan, jawab dengan data, bukan dengan penghinaan. Etika pejabat tidak seperti itu,"ucap Arief.

Menurutnya, pernyataan bernada penghinaan terhadap jurnalis tidak hanya mencederai profesi pers, tetapi juga menunjukkan rendahnya standar komunikasi pejabat publik terhadap kerja-kerja jurnalistik.

Arief merujuk pada pernyataan mantan Direktur RSUD Undata, drg. Herry Mulyadi, yang disebut melontarkan kata "bodoh" kepada jurnalis saat dimintai konfirmasi. Saat ini drg. Herry diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulteng.

KKJ Sulteng menilai tindakan tersebut mencerminkan arogansi kekuasaan dan kegagalan memahami peran pers dalam demokrasi. Jurnalis, kata Arief, bekerja untuk memenuhi hak publik atas informasi dan dilindungi oleh undang-undang.

Selain itu, KKJ Sulteng juga menyoroti permintaan maaf yang hanya disampaikan melalui pesan whatsapp tetapi bukan ke jurnalis yang bersangkutan. Menurut Arief, langkah tersebut belum cukup memperbaiki dampak yang ditimbulkan. "Permintaan maaf secara pribadi lewat whatsapp tidak cukup.

Pernyataan penghinaan itu terjadi di ruang publik, maka klarifikasi dan permintaan maaf seharusnya juga disampaikan secara terbuka. Ini soal tanggung jawab moral dan etika," ujarnya.

Insiden bermula usai pelantikan Direktur RSUD Undata, dr. Jumriani, pada Senin (4/5/2026) sekitar pukul 15.00 WITA di Aula RSUD Undata Palu.

Saat itu, Rian yang hadir untuk meliput kegiatan berupaya mengonfirmasi kepada drg. Herry Mulyadi terkait pedoman teknis pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan yang diterbitkan saat masih menjabat sebagai direktur RSUD Undata.

Awalnya percakapan berlangsung normal. Namun drg. Herry disebut meliput kegiatan berupaya mengonfirmasi kepada drg. Herry Mulyadi terkait pedoman teknis pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan yang diterbitkan saat masih menjabat sebagai direktur RSUD Undata.

Ketika Rian mencoba menggali informasi lebih lanjut, situasi berubah. drg. Herry disebut meningkatkan suara dan melontarkan kata tidak pantas.

"Dia bilang, 'cari yang berkualitas, jangan itu kau tanya, bodoh,'" ujar Rian menirukan ucapan Herry.

Dalam percakapan tersebut juga muncul pernyataan bernada tekanan seperti "mau berteman atau mau cari masalah".

Rian menjelaskan, upaya konfirmasi dilakukan setelah sebelumnya beberapa kali mencoba mengatur jadwal wawancara sejak 28 April 2026, namun belum berhasil. Ia mengaku sedang menindaklanjuti keluhan tenaga kesehatan terkait pembagian jasa pelayanan yang dinilai tidak sebanding dengan beban kerja.

KKJ Sulteng menilai peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pejabat publik di daerah agar menjaga etika komunikasi serta menghormati kemerdekaan pers. Diketahui KKJ Sulteng merupakan inisiatif masyarakat sipil dan organisasi profesi jurnalis yang secara bersama-sama mengadvokasi kasus kekerasan, sengketa ketenagakerjaan, serta memperjuangkan kemerdekaan pers di Sulawesi Tengah. Organisasi ini beranggotakan LPS-HAM Sulteng, LBH JATAM Sulteng, LBH APIK Sulteng, AJI Palu, PWI Sulteng, IJTI Sulteng, PFI Palu, dan AMSI Sulteng. **AMR**



WARTAWAN media Global Sulteng,Rian Afdhal didampingi Ketua KKJ Sulteng, Moh Arief, saat melapor secara resmi dugaan penghinaan yang dilakukan drg. Herry Mulyadi ke SPKT Polresta Palu, Selasa (12/5/2026). FOTO:DOK.KKJ SULTENG



PERSONEL Polsek Tawaeli, saat melakukan olah TKP pembakaran sepeda motor milik dua pencuri yang berhasil melarikan diri di Jalan L.Gadi, Kelurahan Mamboro, Selasa (12/5/2026). FOTO: POLSEK TAWAELI

Gagal Gasak Gas, Motor Pencuri Dibakar Warga

SULTENG RAYA - Dua orang pencuri yang berniat mengasak tabung gas elpiji 3 kilogram, gagal melancarkan aksinya setelah dipergoki pemilik rumah dan warga. Percobaan pencurian itu terjadi di Jalan L. Gadi, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Selasa (12/5/2026) siang. Dua pelaku berhasil kabur, namun sepeda motor yang mereka gunakan tertinggal dan dibakar warga setempat. Kapolsek Tawaeli Iptu Zulham Abdillah mengata-

kan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.30 Wita di rumah milik Rony Tohari (60). "Pelaku berjumlah dua orang. Salah satu pelaku masuk ke dapur rumah korban dan mengambil empat tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram," ujar Zulham.

Saat beraksi, keduanya dipergoki anak pemilik rumah bernama Lucky, yang saat itu berada di dalam rumah. Lucky kemudian merekam aksi pelaku dan menghubungi ayahnya yang sedang berada tidak jauh

dari lokasi kejadian. Saat korban tiba di rumah, satu pelaku sudah berada di atas sepeda motor sambil memuat empat tabung gas, sedangkan rekannya masih berada di halaman rumah untuk mengambil tabung lainnya.

Korban lalu berteriak sambil melempari pelaku menggunakan batu. Kedua pelaku panik dan melarikan diri ke arah semak belukar di samping gudang di Jalan L. Gadi. Saat kabur keduanya meninggalkan sepeda motor

jenis Yamaha, warga yang geram kemudian membakar sepeda motor tersebut.

Setelah menerima laporan, personel piket SPKT dan piket fungsi Polsek Tawaeli tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan dan mengamankan barang bukti sepeda motor dalam kondisi hangus terbakar.

"Kami masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memburu kedua pelaku yang melarikan diri usai kejadian tersebut,"kata Zulham. **AMR**



SAHAL seorang personel Polres Touna, saat meninjau kondisi lahan jagung milik warga, Selasa (12/5/2026).FOTO:HUMAS POLRES TOUNA

Polres Touna Intensifkan Pengecekan Lahan Jagung

SULTENG RAYA - Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Tojo Una-una (Touna) bergerak serentak turun ke lapangan guna memastikan keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Melalui polsek-polsek jajaran, kepolisian mengintensifkan pemantauan dan pengecekan lahan jagung milik warga yang tersebar di beberapa kecamatan sejak Senin (11/5/2026) hingga Selasa (12/5/2026).

Langkah nyata diawali personel Polsek Ampana Kota yang dipimpin Kanit Binmas Aiptu Beny Abubakar bersama tiga anggota lainnya. Mereka meninjau lahan jagung seluas 2 hektare milik Anto di Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratu-lindo.

Lahan yang ditanami sejak Januari 2026 dengan bibit 30 kg ini dipersiapkan sebagai lokasi percontohan panen serentak pada 18 Mei mendatang. Meski pertumbuhan tanaman sempat kurang maksimal akibat cuaca panas dengan estimasi hasil panen sekitar 3 ton petugas tetap

memotivasi petani agar tidak patah semangat.

Pengecekan serupa juga berjalan di wilayah hukum Polsek Ampana Tete. Bhabinkamtibmas setempat mendatangi lahan milik Dahlan seluas setengah hektare di Desa Longge.

Tak berhenti di situ, pada Selasa pagi, Brigpol Agus Putra Andika juga memantau persiapan panen raya di lahan seluas 1 hektare milik Kamruddin Panusu di Dusun Banjar, Desa Pusungi.

Tanaman jagung di lokasi ini dinilai tumbuh baik setelah melewati masa tanam selama empat bulan sejak Januari lalu, dan dijadwalkan dipanen pada 17 Mei 2026.

Bergerak ke wilayah lain, Polsek Tojo mengutus Aipda Putu Radiasa untuk mengecek tanaman jagung berusia satu bulan di lahan setengah hektare milik Sukman di Desa Tojo.

Sementara itu, Polsek Ulubongka membagi personelnya di dua titik terpisah; Aipda Ardianzah memantau lahan seluas 2 hektare milik Alulu di

Desa Watusongu, sedangkan Bripta Risman dan Aipda Faisal A. Lanau mengecek lahan 3 hektare milik Esdar Aba di Desa Rompi yang baru berumur tiga minggu.

Kapolres Tojo Una-Una AKBP Yanna Djayawidya, S.I.K., M.H., melalui Kabag SDM AKP Muh. Natsir, S.H., menegaskan bahwa kehadiran Polri bukan sekadar fungsi pengawasan, melainkan bentuk pendampingan melekat kepada para petani.

"Kegiatan pengecekan yang dilakukan oleh polsek-polsek jajaran ini merupakan komitmen nyata Polres Tojo Una-Una dalam mengawal program prioritas pemerintah pusat terkait ketahanan pangan nasional," ujar Natsir.

Ia menambahkan, pihaknya ingin memastikan para petani kita mendapatkan dukungan moral dan pendampingan yang maksimal. Meskipun di beberapa titik ada kendala cuaca panas yang memengaruhi kesuburan tanaman, anggota di lapangan tetap memberikan motivasi agar produktivitas tidak menurun. **AMR**

LPKA Palu Gandeng Disdukcapil, Percepat Perekaman NIK Anak Binaan

SULTENG RAYA - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palu, melaksanakan perekaman data kependudukan dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi anak binaan, Selasa (5/5/2026).

Program ini merupakan bentuk percepatan pelayanan administrasi guna mendukung pemenuhan hak-hak sipil anak binaan, serta mewujudkan tertib data di lingkungan pemasyarakatan.

Sebanyak 24 orang anak binaan mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias. Rangkaian kegiatan dimulai dari verifikasi data awal oleh petugas registrasi, dilanjutkan dengan perekaman biometrik KTP elektronik yang meliputi pengambilan foto, sidik jari, serta perekaman iris mata. Selanjutnya, data yang telah direkam disinkronisasikan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Disdukcapil.



ANAK binaan LPKA Palu saat menjalani perekaman data kependudukan dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Selasa (5/5/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

Kasubi Registrasi, Robby, menyambut baik kegiatan ini. Ia mengatakan pemenuhan hak identitas bagi anak binaan menjadi langkah penting yang berdampak positif terhadap proses pembinaan yang di LPKA

Palu. "Kami bersyukur karena hak identitas anak binaan dapat terpenuhi. Ini akan sangat membantu dalam proses pembinaan dan reintegrasi selanjutnya, dan kami siap memfasilitasi data yang diperlukan," ujar

Robby.

Kepala Seksi Disdukcapil Palu, Tasrif, pun turut menjelaskan bahwa program ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Palu dalam memberikan layanan administrasi kependudukan di lingkungan pemasyarakatan.

"Kami melakukan verifikasi NIK, kemudian perekaman biometrik bagi yang belum memiliki KTP. Setelah itu diproses hingga publikasi KTP. Selain itu juga dilakukan pemadanan data untuk memastikan keakuratan identitas," ujar Tasrif.

Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib. Upaya ini juga menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan hak dasar bagi anak binaan, khususnya dalam aspek identitas hukum.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh anak binaan di LPKA Kelas II Palu dapat memiliki identitas kependudukan yang sah sehingga memudahkan akses terhadap berbagai layanan publik ke depannya. 7/AT

LPKA Palu Bersama Polri Razia Gabungan Sterilkan Narkoba



SEJUMLAH anak binaan LPKA Palu saat digeledah petugas, Jumat (8/5/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

SULTENG RAYA - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu terus berkomitmen menjaga integritas dan keamanan lingkungan pembinaan. Sebagai langkah konkret, LPKA Palu melaksanakan pengeledahan insidentil dalam rangka mewujudkan Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan pada Jumat (8/5/2026).

Pengeledahan kali ini mengedepankan aspek sinergitas antar penegak hukum. Dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala LPKA Palu, Jemmy, petugas LPKA bekerja sama dengan jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Palu Selatan yang diwakili oleh Babinkamtibmas, Aipda Moh. Ridho.

Pengeledahan menyasar kamar-kamar hunian Anak Binaan untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang masuk ke dalam lingkungan LPKA Palu. Kehadiran pihak kepolisian dalam giat ini menjadi bukti nyata sinergi antara Direktorat Pemasyarakatan (Ditjenpas) dengan Polri

dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

Plh. Kepala LPKA Palu, Jemmy, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya preventif untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban.

"Kami tidak memberikan ruang sedikit pun bagi peredaran handphone ilegal maupun narkoba di dalam LPKA. Pengeledahan ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan proses pembinaan berjalan murni tanpa gangguan dari praktik-praktik ilegal," ujar Jemmy.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pemasyarakatan khususnya di LPKA Palu.

"Prinsip Back to Basics harus dijalankan dengan konsisten. Saya mengapresiasi langkah cepat LPKA Palu. Tidak ada toleransi bagi petugas maupun warga binaan yang terlibat dalam penyalahgunaan handphone, narkoba, dan pungli (Halinar). Kita harus pastikan Pemasyarakatan benar-benar bersih demi marwah institusi," tegas Bagus Kurniawan.

Dalam pengeledahan yang berlangsung humanis namun teliti tersebut, petugas tidak menemukan adanya narkotika. Barang-barang yang dianggap berisiko dan tidak sesuai aturan segera diamankan untuk kemudian dimusnahkan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, LPKA Palu berharap dapat terus menciptakan ruang yang aman bagi Anak Binaan untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik sebelum kembali ke masyarakat. 7/AT

Apel Ikrar Bersama, Strategi LPKA Palu Sapu Bersih Halinar



JAJARAN LPKA Kelas II Palu saat menggelar Apel dan Ikrar Bersama dengan tema "Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan (Halinar) pada Kamis (7/5/2026) di halaman LPKA Palu. FOTO: HUMAS LPKA PALU

SULTENG RAYA - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu menggelar Apel dan Ikrar Bersama dengan tema "Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan (Halinar) pada Kamis (7/5/2026) di halaman LPKA Palu.

Kegiatan krusial itu dilaksanakan dalam rangka menjaga integritas dan keamanan institusi. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural, staf, serta regu pengawasan dengan menghadirkan saksi dari unsur kepolisian guna memperkuat komitmen pemberantasan pelanggaran di dalam lingkungan pemasyarakatan.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala LPKA Palu, Jemmy, memberikan arahan tegas kepada seluruh peserta. Ia menekankan bahwa ikrar yang diucapkan bukan sekadar seremonial,

melainkan janji yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Ikrar hari ini adalah benteng pertahanan kita terhadap godaan pelanggaran. Saya instruksikan kepada seluruh petugas untuk tidak coba-coba menjadi jembatan masuknya Halinar. Fokus kita adalah pembinaan masa depan anak-anak kita, dan itu hanya bisa dicapai jika lingkungan kita bersih dari gangguan keamanan dan ketertiban," tegas Jemmy.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas Polsek Palu Selatan, Aipda Moh. Ridho, yang turut menyaksikan pembacaan ikrar. Dalam kutipannya, ia memberikan dukungan penuh terhadap langkah preventif yang diambil oleh LPKA Palu.

"Kami dari pihak kepolisian, khususnya Polsek Palu Selatan, siap mendukung penuh LPKA Palu dalam

menjaga stabilitas keamanan. Sinergi ini penting agar deteksi dini terhadap peredaran narkoba maupun penipuan dapat berjalan efektif. Kami mengapresiasi langkah terbuka LPKA Palu dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi semua," ujar Moh. Ridho.

Secara terpisah, Kepala

Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, memberikan apresiasi dan penguatan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa disiplin adalah kunci utama transformasi pemasyarakatan. "Saya sangat mengapresiasi gerak cepat LPKA Palu dalam menggaungkan perang terhadap Halinar. Ini adalah implementasi nyata dari perintah pimpinan untuk mewujudkan pemasyarakatan yang maju. Tidak ada tempat bagi petugas yang bermain-main dengan narkoba atau membiarkan praktik penipuan terjadi. Mari kita jaga marwah institusi dengan kinerja yang bersih," kata Bagus Kurniawan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, LPKA Kelas II Palu berharap dapat menjadi role model dalam penegakan disiplin dan menciptakan suasana pembinaan yang sehat, aman, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. 7/AT

Turnamen Bulutangkis Piala Pangdam XXIII/PW 2026 Resmi Ditutup



PANGDAM XXIII/Palaka Wira, saat berpose bersama para pemenang Turnamen Bulutangkis Piala Pangdam XXIII/Palaka Wira (PW) Tahun 2026, Rabu (6/5/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Adapun para juara pertama dalam turnamen ini, yakni kategori Ganda Dewasa Putra C diraih Andy dan Iqbal dari Klub PB Scarlet, Ganda Dewasa Putra diraih Bais Maulana Khazem dan Artaldo Marcelino dari Klub PB Central, Ganda Remaja Putra diraih Muh. Zaki dan Renaldi Amir Baso dari Klub PB Scarlet/PB Sehati, Tunggal Remaja Putra diraih Muh. Zaki dari Klub

PB Scarlet, Tunggal Pemula Putra diraih Gusti Manik Artha dari Klub PB Central, Tunggal Anak-Anak Putra diraih Muh. Raditya Naufal dari Klub PB Central, Tunggal Pemula Putri diraih Patricia Aurella O dari Klub PB Central Palaka Wira, serta Tunggal Anak-Anak Putri diraih Akifa Nallah Mappa dari Klub PB Central.

Acara kemudian diakhiri dengan penyerahan medali,

piagam penghargaan, dan uang pembinaan kepada para juara oleh Kasdam XXIII/Palaka Wira bersama para Pejabat Utama Kodam XXIII/Palaka Wira, Ketua Umum PBSI Sulawesi Tengah Ir. Gufran Ahmad, serta Ketua Harian KONI Sulawesi Tengah Moh. Ifan Taufa sebagai bentuk apresiasi atas semangat, sportivitas, dan prestasi para peserta selama turnamen berlangsung.

Seluruh rangkaian kegiatan penutupan Turnamen Bulutangkis Piala Pangdam XXIII/Palaka Wira Tahun 2026 berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Para peserta pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pangdam XXIII/Palaka Wira atas terselenggaranya turnamen tersebut serta berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga bulutangkis di Sulawesi Tengah. Turnamen Piala Pangdam XXIII/PW ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus mendukung upaya pencarian dan pembinaan bibit-bibit atlet bulutangkis potensial di Provinsi Sulawesi Tengah. 7/AT



Tembus 10 Besar JRRC, Wahyu Nugroho Terus *Improve Skill*



WAHYU Nugroho bersama tim Yamaha dalam All Japan Road Race Championship (JRRC). FOTO: YAMAHA

SULTENG RAYA - Komitmen Yamaha untuk mengasah karir para pembalap di level internasional dilakukan secara berkelanjutan agar mencapai prestasi dan menambah pengalaman.

Berbagai kejuaraan diikuti baik di tingkat dunia maupun Asia, sehingga mempertajam skill demi menghadapi persaingan

yang kian kompetitif.

Musim ini rider Yamaha Racing Indonesia, Wahyu Nugroho, bahkan diberikan kesempatan berkompetisi

pada dua event yaitu Asia Road Racing Championship (ARRC) dan All Japan Road Race Championship (JRRC).

Usai menjalani seri 1 ARRC di Sepang Malaysia 10-12 April lalu, Wahyu Nugroho tampil untuk pertama kalinya di All Japan Road Race Championship. Sebagai persiapan balapan di ajang tersebut, Wahyu Nugroho mengikuti dua hari test pra musim di sirkuit

Sugo dan latihan short-course di sirkuit Suzuka.

Bermanfaat untuk memahami karakter sirkuit dan set up motor, hasilnya terbukti ada improvement saat race. Rider asal Boyolali Jawa Tengah itu ambil bagian pada putaran perdana kelas ST600 All Japan Road Race Championship 25-26 April di sirkuit Sugo. Bergabung dengan tim ITO Racing YRI BORG Custom dan

bertarung dengan menggeber Yamaha YZF-R6, pencapaiannya cukup positif menembus 10 besar klase-men sementara.

Dia menempati peringkat 9 setelah finish ke-11 race 1 dan ke-9 race 2. "Terimakasih Yamaha saya bisa tampil di All Japan Road Race Championship musim ini. Kesempatan ini sangat berharga untuk menambah jam terbang dan experience. Juga terus berkompetisi menggunakan Yamaha YZF-R6 yang menjadi faktor penting untuk kemajuan di dua kejuaraan yang saya ikuti. Saya akan selalu berupaya mencapai hasil optimal dan memanfaatkan dengan baik peluang tampil di tingkat internasional," ungkap Wahyu Nugroho.

Dalam rangkaian race weekend di Sugo, dia berhasil memperkecil waktu best time dan gap dengan top 1 rider mulai dari latihan bebas, kualifikasi hingga race. Wahyu Nugroho juga mampu memimpin 2nd Group Race. Tak hanya itu, catatan waktu best time saat race weekend jauh lebih baik dibandingkan test pra musim.

All Japan Road Race Championship menjadi ajang yang tepat bagi Wahyu Nugroho untuk berkompetisi menjajal Yamaha R6. Bentuk latihan juga di kompetisi resmi yang kami harapkan berpengaruh positif untuk berprestasi di ARRC ajang utama yang diikutinya. Telah melewati seri 1 kelas ST600 All Japan Road Race."/>

Pemkot Yogyakarta Data Ulang *Daycare* Usai Kasus Kekerasan Anak



DAYCARE Little Aresha yang berlokasi di Jalan Pakel Baru Utara, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta tengah menjadi sorotan publik setelah digrebek polisi, Jumat (24/4/2026). FOTO: REP

SULTENG RAYA - Pemerintah Kota Yogyakarta segera melakukan identifikasi terhadap daycare atau tempat penitipan anak yang aman dan tepercaya guna menampung anak yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran di Daycare Little Aresha, Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo.

"Jadi, bagaimana mulai pagi hari Senin (27/4) anaknya mau dititip di mana, ini saya kira suatu hal yang mendesak dan darurat," kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo usai audiensi dengan orang tua korban di Yogyakarta, Ahad (26/4/2026) sore.

Terlebih, katanya, para orang tua yang menitipkan anak di daycare tersebut pada umumnya bekerja dan tidak memiliki banyak waktu bersama anak saat jam kerja.

Atas kondisi tersebut, katanya, pemerintah daerah harus hadir.

"Pemerintah harus hadir, dan kami akan segera mengidentifikasi daycare-daycare lainnya yang aman, tepercaya, dan sehat. Kepala Dinas Pendidikan serta kepala dinas lainnya bersama KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) segera mengidentifikasi," katanya.

Dengan demikian, kata dia, akan diketahui tempat penitipan anak mana yang akhirnya bisa menampung anak-anak yang berhenti menitipkan anak di daycare yang kemudian digerebek aparat kepolisian tersebut.

"Kami menganggap ini adalah satu langkah darurat

yang harus segera dilakukan, supaya mereka bisa menitipkan anaknya di situ," katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah juga menginstruksikan dinas terkait dan pemangku kepentingan untuk melakukan razia terhadap seluruh tempat daycare di Kota Yogyakarta.

"Hari ini sudah masuk data semua daycare yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian kita akan cek satu per satu. Besok (27/4) pagi kita cek satu per satu, sehingga dalam waktu singkat, paling lama dua hari, kita sudah tahu semua status daycare yang ada di Yogyakarta," katanya.

Menurut dia, hal tersebut menjadi penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan para orang tua, termasuk pemda dalam menghadirkan tempat penitipan anak yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak menjadi lebih baik.

Ia mengatakan para orang tua juga menginginkan agar kasus kekerasan yang menimpa buah hati selama diasuh di daycare tersebut betul-betul ditangani dan harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

"Tentu, kami juga membersamai. Untuk itu, kami bersama KPAI membentuk tim. Kemudian juga ada konsultan hukum yang nanti menampung dan mencatat semua laporan yang disampaikan orang tua sebagai bahan masukan pada proses hukum selanjutnya," katanya.rpr

Puluhan Ribu Warga Kabupaten Bandung Terdampak Banjir



WARGA menggunakan perahu kayu saat banjir melanda Kampung Bojongasih, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ahad (12/4/2026). FOTO: ANT

SULTENG RAYA - Puluhan ribu warga Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terdampak banjir akibat hujan deras dan luapan sungai Citarum yang terjadi sejak Jumat (10/4/2026) kemarin hingga saat ini.

Sebagian warga pun terpaksa mengungsi ke tempat pengungsian.

Camat Dayeuhkolot, Asep Suryadi mengatakan luapan air Sungai Citarum, Cipasarari dan Cigede menyebabkan banjir merendam pemukiman di wilayah Dayeuhkolot sejak Jumat (10/4/2026) hingga Senin (13/4/2026) hari ini. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 10 sentimeter hingga 1 meter.

Ia menyebut banjir merendam pemukiman di sejumlah kampung di Desa Dayeuhkolot, Desa Citeureup, Desa Canguang Wetan dan Kelurahan Pasawahan.

"Banyak rumah warga yang terendam banjir dan sebagian akses jalan terputus," ucap dia, Senin (13/4/2026).

Ia menuturkan jumlah korban terdampak sebanyak 4.800 kepala keluarga atau 14.440 jiwa di Desa

Dayeuhkolot, 2.943 jiwa di Desa Citeureup, 1.725 Desa Canguang Wetan dan 340 jiwa di Desa Pasawahan. "Total korban jiwa terdampak se-Kecamatan Dayeuhkolot mencapai 19.408 jiwa," ungkap dia.

Sedangkan korban mengungsi mencapai 122 jiwa.

Mereka membutuhkan makanan siap saji, dan lainnya. "Kondisi di jalan raya Dayeuhkolot masih tergenang banjir antara 40-50 sentimeter bisa dilalui kendaraan roda empat sedangkan roda dua jangan memaksakan," kata dia.

Sebelumnya, Badan Mete-

orologi Klimatologi Geofisika (BMKG) menyebut pada masa peralihan ini masyarakat diimbau untuk waspada terhadap cuaca ekstrem dengan tidak berteduh di bawah pohon, papan reklame, atau dekat bangunan yang rentan saat kejadian berlangsung. Selain itu tetap waspada

potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor serta angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang dan hujan es.

"Masyarakat diimbau waspada cuaca ekstrem dan bencana," kata Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu.rpr

BIRO PERJALANAN UMUM
PT. MEDI SUKA LAKSANA (MSL TRAVEL)

Dapatkan Promo Menarik Tujuan : Poso-Palu

1. Beli tiket 10 kali dengan nama sama dalam sebulan, GRATIS 1 kali pemberangkatan
2. Diberikan Fasilitas Sarapan/Makan Pagi untuk Penumpang
3. Melayani pengiriman paket Poso-Palu dengan aman

Segera hubungi :
Agen Poso : 0812 9688 9876
Agen Palu : 0813 9688 9877

Biro Perjalanan Umum
CV MITRATOUNA TRAVEL/BIS
PALU-AMPANA

AGEN PERWAKILAN :

PALU : Jl. Tombolotutu No.50-52
Telp : (0451) 424347 - 4704707 - 427139

AMPANA : Jl. Tanjumbulu Bawah No. 9 (Dekat Tugu Ampana)
Telp : 081252984112, 081252984116
081243799363, 082122150777

LORENNNA
TRAVEL AGENT & EXPEDITION

Untuk yang berlangganan rental MOBIL LORENNNA akan mendapatkan FREE MINERAL WATER & SNACK 7x Keberangkatan
Palu-Tolis gratis 1 tiket

Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mawar No.111
Tolitali
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813 4124 2003
WA : 0852 3255 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

BIRO PERJALANAN UMUM
PRIMA JAYA TRAVEL

PALU - POSO - TENTENA
BUNGKU - KENDARI

PALU Jl. Haulua No. 40 Telp.: 082306625339	BUNGKU (MOROWALI) Jl. Trans Sulawesi (Depan RSUD Morowali) Telp.: 085304570024	KENDARI Terminal Puwatu Telp.: 082342677110
---	--	--

Penguatan Ketahanan Pangan Jadi Fokus Kerja Bersama

KARENA itu, kerja sama lintas sektor antara pemerintah, BUMD, dan pelaku usaha dianggap menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang kini didorong pemerintah ialah penguatan sistem rantai dingin atau cold chain guna memastikan distribusi pangan berjalan lebih efektif dan efisien.

OLEH : NAUFAL PRASETYA

BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menilai BUMD memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan nasional, terutama melalui penguatan interkoneksi rantai dingin. Sistem tersebut dinilai mampu menjaga kualitas pangan, mengurangi kerusakan hasil pertanian, dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia di berbagai daerah. Penguatan cold chain juga dianggap penting untuk menjaga stabilitas harga pangan yang selama ini kerap dipengaruhi masalah distribusi dan logistik.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Rochayati Basra menyampaikan bahwa penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan. Rochayati Basra menjelaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis dalam menjamin kelancaran distribusi, stabilisasi pasokan, serta pengelolaan logistik yang efektif. Karena itu, penguatan BUMD pangan menjadi langkah konkret untuk membangun sistem cold chain yang terintegrasi di berbagai wilayah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa urusan pangan termasuk kewenangan daerah. Dengan aturan tersebut, pemerintah daerah bersama perangkat daerah dan BUMD memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sistem distribusi pangan yang berkelanjutan. Daerah diharapkan mampu mengambil langkah strategis sesuai kebutuhan wilayah masing-masing agar ketahanan pangan tetap terjaga.

Perwakilan Organisasi Rantai Pendingin Indonesia Hasanuddin Yasni menilai

swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga kemampuan negara dalam mengelola, mengolah, dan mendistribusikan produk pangan dengan dukungan teknologi dan kebijakan yang memadai. Hasanuddin Yasni menekankan pentingnya pembangunan ekosistem rantai dingin karena masih banyak hasil pertanian dan perikanan yang mengalami kerusakan akibat lemahnya sistem penyimpanan dan distribusi.

Menurut Hasanuddin Yasni, penguatan cold chain membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta model bisnis kolaboratif. Kerja sama antara pemerintah daerah, BUMD, dan pelaku usaha dianggap menjadi solusi penting untuk mengatasi keterbatasan investasi dan teknologi di daerah. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pangan yang lebih modern dan terintegrasi.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Pemerintah membutuhkan dukungan dunia usaha dan masyarakat agar sistem pangan nasional menjadi lebih kuat. Sebaliknya, pelaku usaha juga membutuhkan dukungan regulasi, infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung

pengembangan sektor pangan nasional. Karena itu, sinergi antarpihak dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menegaskan bahwa Pemerintahan Kota Cilegon mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Menurut Fajar Hadi Prabowo, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, termasuk penguatan sektor pertanian di tengah status Cilegon sebagai kota industri.

Fajar Hadi Prabowo juga menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan keberhasilan percepatan swasembada pangan nasional tahun 2025 yang mampu dicapai lebih cepat dari target awal. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai hasil kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Selama setahun terakhir, pemerintah juga dinilai berhasil menjaga stabilitas pangan nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Beberapa capaian yang mendapat perhatian antara lain peningkatan produksi beras nasional, ketersediaan pupuk subsidi,

modernisasi pertanian, hingga penguatan distribusi pangan. Di tengah ancaman krisis pangan global dan ketidakpastian ekonomi dunia, capaian tersebut menjadi bukti bahwa sektor pangan Indonesia mulai menunjukkan daya tahan yang lebih kuat.

Pemerintah pusat juga terus memperkuat sektor pertanian melalui optimalisasi lahan, pembangunan irigasi, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Langkah tersebut diperkuat oleh dukungan pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah masing-masing. Kolaborasi pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan nasional.

Kerja sama yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, dan pelaku usaha menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Penguatan sistem rantai dingin, peningkatan produktivitas pertanian, serta pembangunan sistem distribusi yang lebih modern menunjukkan bahwa Indonesia terus bergerak menuju tata kelola pangan yang lebih baik. Dengan dukungan seluruh pihak, ketahanan pangan diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. *) *Analisis Kebijakan Pangan Nasional*

TAJUK

Pantang Kalah Lawan Judol

NEKAT betul, ada bandar yang berani buka markas judi online (judol) tak jauh dari Kantor Presiden, kurang dari 3 kilometer jaraknya dari Istana Negara, Jakarta. Bermarkas di Hayam Wuruk Tower, sang bandar sudah beroperasi dua bulan lamanya di sana.

Dua lantai gedung itu disewa dengan mempekerjakan 321 karyawan. Dari jumlah karyawan tersebut, hanya satu yang berkewarganegaraan Indonesia, sisanya orang asing. Dari Vietnam paling banyak. Sisanya dari Tiongkok, Myanmar, Laos, Tailand, Malaysia, dan Kamboja. Olahraga Indonesia

Jika polisi tak menggerebek kantor itu akhir pekan lalu, tak ada yang tahu ada markas judol yang lokasinya hanya ‘sejengkal’ dari istana. Pun, tidak jauh jaraknya dari Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang tiap hari bertugas memblokir situs-situs judol.

Entah mengejek atau apa motivasi sesungguhnya sang bandar, sampai berani bikin markas judol dekat dari kantor pusat pemerintahan. Namun, terlepas dari spekulasi itu, hal yang pasti ialah sang bandar melihat adanya celah kemudahan berinvestasi judi daring di Indonesia.

Tidak mungkin mereka membangun kantor di sana tanpa didahului ‘studi kelayakan’ sebelumnya. Apalagi jika perhitungan ‘studi kelayakan’ itu mendapati beban usaha jauh di bawah keuntungan yang bakal diraup, tak seorang pun bandar yang akan melewatkan kesempatan tersebut.

Ya, harus diakui, judol terus mewabah. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan judol masih jadi kegiatan masif hingga saat ini. Pada 2025 saja, perputaran dana judol mencapai Rp286,84 triliun yang berasal dari 422,1 juta kali transaksi.

Perputaran dana itu memang menurun 20% jika dibandingkan dengan di 2024 yang sebesar Rp359,81 triliun. Akan tetapi, jutaan transaksi dan ratusan triliun rupiah yang raib untuk judol pada 2025 tetaplah bukan angka yang terbilang kecil. PPATK juga menemukan fakta kian mudahnya para penjudi bertaruh. Setoran ke bank, e-wallet, hingga QRIS kian memudahkan para petaruh itu mengadu untung.

Gencarnya Kementerian Komdigi memblokir berbagai situs judol tak menyurutkan asa para penjudi. Bahkan penegakan hukum oleh polisi pun tak membuat para bandar gentar. Buktinya, pada kuartal I 2026 saja, PPATK mencatat nilai deposit judol mencapai Rp10,6 triliun. Dalam tiga bulan awal itu perputaran dana judol sudah mencapai Rp40,3 triliun.

Data PPATK tersebut jelas menyodorkan fakta amat memprihatinkan perihal kuatnya penetrasi judol dalam menjadikan Indonesia sebagai target pasar. Dampaknya teramat fatal. Tak sedikit yang menjadi korban judol ialah anak-anak usia sekolah. Sulit dibayangkan seperti apa wajah negeri ini ke depan jika banyak generasi mudanya justru mempertaruhkan masa depan mereka di aplikasi ataupun laman judi.

Celaknya, ketika negara ini sedang berupaya memutus akses pasar judol, para bandar justru melihat celah peluang lain. Terbongkarnya markas judi di Hayam Wuruk membuktikan satu fakta baru bahwa Indonesia kini tidak lagi sekadar menjadi pasar, tapi juga mulai dijadikan ‘sarang’ bisnis judi daring.

Kenyataan pahit itu jelas menuntut keagresifan negara dalam memberantas judol. Berantas sampai ke akar-akarnya, tiada kata ampun. Pemberantasan judi tak bisa lagi dilakukan dengan cara yang biasa. Judi daring sudah telanjur berkembang menjadi kejahatan luar biasa. Maka, tidak boleh lagi ada cerita tentang lemahnya pengawasan negara.

Perang terhadap judol harus terus digelorakan. Kita tak boleh sedetik pun lengah atau bahkan menganggap enteng judol. Seluruh anak bangsa harus bahu-membahu, tak boleh membiarkan Kementerian Komdigi dan kepolisian bekerja sendirian.

Untuk penegak hukum, mulai dari polisi hingga pengadilan, tentunya tak boleh lagi menjatuhkan hukuman yang biasa, baik bagi bandar maupun pemain. Harus ada hukuman yang amat menjerakan agar menjadi contoh bagi yang lain. Sekali lagi, negara tak boleh kalah dari penjudi dan bandar judi karena masa depan bangsa yang akan dipertaruhkan. *) *Media Indonesia*

FOMO dan Gen Z: Ketika Takut Tertinggal Menjadi Gaya Hidup

FOMO atau singkatan dari fear of missing out adalah rasa takut atau cemas tertinggal momen, pengalaman, atau tren seru yang dialami orang lain. Fenomena ini sangat dekat dengan gen z, karna generasi ini hidup berdampingan dengan media sosial. Yang memudahkan mereka mendapatkan info yang sedang tren sekarang.

OLEH : PUTRI



Salah satu contoh yang paling memprihatinkan adalah bagaimana sebagian penerima beasiswa memanfaatkan dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang pendidikan, justru di alihkan untuk memenuhi gaya hidup agar tidak ketinggalan tren yang ada.

Fenomena ini menunjukkan bahwa FOMO bukan sekedar tren melainkan jelek. FOMO menciptakan siklus yang sulit di putus: melihat, membandingkan, merasa kurang, lalu berusaha mengejar. Namun Semakin di kejar semakin tinggi standar yang muncul dan akhirnya kepuasan itu menjadi sulit di jangka.

Pada akhirnya banyak gen z justru terjebak antara keinginan dan kebutuhan. Mereka lebih fokus untuk mengikuti semua yang sedang tren, seperti adanya cafe baru, tempat wisata baru, makanan, baju-

baju, dan handphone terbaru. Semuanya ingin di coba tanpa memikirkan manfaatnya.


Padahal kita tidak pernah tau bahwa apa yang kita lihat di media sosial sama dengan kenyataannya. Banyak dari konten-konten di

media sosial justru sudah di poles sedemikian rupa agar kelihatan indah dan menarik padahal kenyataannya biasa saja

Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran diri, stop banding bandingkan

diri dengan konten-konten yang kamu liat di media sosial, karna tidak semua hal harus di ikuti, tidak semua tren harus di jalani dan tidak semua validasi perlu di cari. Penulis: Mahasiswa *UIN Dato-karama Palu*



 <p>PENERBIT: PT. Trimedia Sulteng Mandiri No. Rek. Bank Sulteng, An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri Acc. 0010107770011, Rek.BSI No. 728273443 a.n. PT. Trimedia Sulteng Mandiri Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205222-6 An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan (Ahmad Aversu Toana, Sudarsono, Syafii, Agung Ramadnan) PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP (Isi di luar tanggung jawab percetakan)</p>	<p>WARTAWAN HARIAN SULTENG RAYA, DIBEKALI KARTU PERS/SURAT TUGAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI</p>	<p>PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana. DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara. PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwan.</p>
		<p>REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Rahmat Kurniawan. STAF REDAKSI: Irwan, Andi Nurhidayat, Amiluddin, Amar Sakti, Andi Besse Rahmat Kurniawan, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Jane Lestari Parabak</p> <p>LITBANG: A. Madukelleng, Fery, Hangga Nugracha. BIRO DONGGALA: Wahid Agus. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT : - BIRO MOROWALI: Intan. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam. BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro). BIRO BANGGAI: Pariaman T.</p> <p>DESIGN & ARTISTIK: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Narwanro, Zainuddin L, Eko Margianto. KEUANGAN: Febrianti. EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36 TLP: 0451 4012 445 ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.</p>

OJK Sulteng Perkuat Literasi-Inklusi Keuangan Penyandang Disabilitas



FOTO bersama pada kegiatan di Gedung Workshop Bank Sulteng, Kota Palu, beberapa waktu lalu.
FOTO: DOK. OJK SULTENG

SULTENG RAYA - Otoritas Jasa Keuangan secara berkelanjutan berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas sebagai salah satu segmen prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNL-KI) 2021-2025.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan untuk mendorong layanan jasa keuangan yang lebih inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.

OJK telah menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan

Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.

Melalui kebijakan ini, pelaku usaha jasa keuangan didorong untuk menyediakan layanan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan formulir huruf braille bagi penyandang disabilitas netra, media informasi yang aksesibel, layanan prioritas, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya guna memperluas akses literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat disabilitas.

Selain itu, pada tahun 2025, OJK juga telah meluncurkan Buku Pedoman Literasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas bertema “Disabilitas Cerdas dan Sehat Finansial Menuju Indonesia Emas 2045” hasil kolaborasi bersama Kementerian Sosial RI, Kementerian PPN/Bappenas, dan Komisi Nasional Disabilitas RI.

Buku tersebut disusun untuk memberikan panduan sederhana mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, seperti pengelolaan uang dan bantuan sosial, membedakan kebutuhan dan keinginan, menabung, hingga memampukan penyandang disabilitas untuk mulai berinvestasi secara bijak dan aman.

Selain itu, materi dalam buku tersebut dapat menjadi “tameng” dalam menghadapi berbagai modus kejahatan di sektor jasa keuangan. Dalam pengembangannya, pedoman tersebut juga akan tersedia dalam format ramah disabilitas seperti braille, audiobook, dan format lainnya.

Sebagai langkah pemberdayaan penyandang disabilitas melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan edukasi keuangan, business matching, sekaligus peluncuran buku pedoman literasi keuangan disabilitas yang berlangsung di Gedung Workshop Bank Sulteng, Kota Palu, beberapa waktu

lalu. Kegiatan ini diikuti oleh 200 peserta yang berasal dari komunitas disabilitas Kota Palu.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Bonny Hardi Putra menyampaikan, penyandang disabilitas perlu mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses layanan jasa keuangan dan pengembangan ekonomi.

“Melalui kegiatan ini, OJK mendorong penyandang disabilitas agar semakin cakap dalam mengelola keuangan, memiliki akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta memperoleh peluang pengembangan usaha dan pembiayaan melalui kegi-

atan business matching,” kata Bonny Hardi Putra dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari OJK Provinsi Sulawesi Tengah, pelaku usaha jasa keuangan, serta pemangku kepentingan terkait sebagai upaya penguatan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

Materi yang disampaikan mencakup pengelolaan keuangan yang bijak, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan, pentingnya perencanaan keuangan, serta kewaspadaan terhadap

aktivitas keuangan ilegal dan berbagai modus penipuan di sektor jasa keuangan.

Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan business matching antara peserta dan pelaku usaha jasa keuangan guna membuka peluang akses pembiayaan, penguatan kapasitas usaha, serta perluasan jejaring usaha bagi penyandang disabilitas.

Melalui kegiatan ini, OJK Sulawesi Tengah berharap dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas sekaligus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. ■■

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri



JAJARAN direksi BSI. FOTO: DOK. BSI

SULTENG RAYA - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatatkan pertumbuhan tabungan tertinggi di industri.

Hal tersebut didorong tingginya antusias berhaji yang berdampak pada lonjakan nasabah Tabungan Haji hingga menembus 7,25 juta di mana 1,2 juta merupakan generasi muda (Millennial dan Gen-Z).

Pertumbuhan Tabungan Haji mengantarkan BSI melanjutkan kinerja yang solid sejak merger, sekaligus menunjukkan bahwa dual licence bank syariah dan bank emas sukses menumbuhkan customer base secara signifikan. Sejak merger 1 Februari 2021, nasabah BSI tumbuh 9,26 juta, dan khusus pada tiga bulan pertama tahun 2026, jumlah nasabah bertambah 0,5 juta menjadi 23,7 juta.

Peningkatan customer base selanjutnya mendorong Dana Pihak Ketiga (DPK) BSI pada Triwulan I 2026 tumbuh 18% (YOY), menjadi Rp376,8 triliun. Tak hanya tinggi, DPK BSI tumbuh pada segmen dana murah (CASA) di mana Giro naik 24,17% (YOY) menjadi Rp71,7 triliun dan Tabungan tumbuh 20,18% (YOY) menjadi Rp164,5 triliun. Total dana murah (CASA) tumbuh 21,36% (YOY) menjadi Rp236,2 triliun.

“Tabungan saat ini menjadi engine growth BSI termasuk dari Tabungan Haji,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo pada paparan kinerja Perseroan Triwulan I 2026.

BSI, kata dia, fokus pada penumbuhan Tabungan Haji, Payroll, dan Tabungan Bisnis. Sebagai bank syariah dengan status persero, BSI berperan aktif mendukung antusiasme umat Islam Indonesia untuk berhaji.

Data BSI menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk berhaji terus melonjak di mana pada tahun 2023 pendaftar haji nasional 286,4 ribu naik menjadi 422,3 ribu pada 2025.

BSI menunjukkan dominasinya di dalam pendaftaran tabungan haji nasional dengan peningkatan market share semula 49,5% pada tahun 2023 menjadi 53,6% pada tahun 2025. Dari 422,3 ribu pendaftar haji sebanyak 226,4 ribu mendaftarkan melalui BSI. Untuk fase keberangkatan pun BSI mendominasi di mana pada tahun 2026 sebesar 83,5% dari total kuota keberangkatan adalah jemaah yang mendaftarkan lewat BSI.

Pendaftar haji Melalui BSI meningkat setiap tahun dengan didukung kemudahan pembukaan rekening melalui platform BYOND by BSI serta berbagai campaign program haji yang dilakukan secara nasional.

Peningkatan DPK mendorong total asset BSI per posisi Maret 2026 naik menjadi Rp460,1 triliun yang mengantarkan BSI naik peringkat ke jajaran Top 5 Bank di Indonesia setelah resmi masuk sebagai bank Persero pada 23 Januari 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bank syariah saat ini memiliki posisi dan kinerja yang sejajar dengan bank besar.

Layanan haji adalah bagian dari implementasi lisensi BSI sebagai bank syariah. Saat ini BSI juga sebagai satu satunya bank yang memperoleh lisensi emas yang terbukti meningkatkan inklusivitas, ditandai naiknya nasabah non-Muslim menjadi 12%.

“Keunikan dual licence menghasilkan kinerja BSI yang sehat dan profit sustain. Pada Triwulan I 2026 BSI membukukan laba bersih Rp2,2 triliun, tumbuh 17,1% (YOY). Kinerja tersebut adalah hasil dari implementasi strategi penurunan biaya dana, penajagan kualitas pembiayaan serta pertumbuhan pendapatan berbasis fee terutama dari bisnis emas.

Direktur Finance and Strategy Ade Cahyo Nugroho mengungkap dual licence mendorong pertumbuhan Fee Based Income (FBI) BSI pada Triwulan I 2026 ke level Rp2,09 triliun, naik 22,98% (YOY).

Komposisi FBI terhadap total pendapatan BSI naik menjadi 22,98% dengan bisnis emas sebagai kontributor tertinggi 33,69% dengan total Rp705 miliar – tumbuh 125% (YOY), disusul treasury dengan komposisi 21,67% dan E-channel sebesar 17,46%. Dari bisnis emas,

BSI berhasil menumbuhkan pembiayaan gadai emas 58,3% (YOY) dan E-mas tumbuh lebih dari 2.700 %.

Dari sisi pembiayaan, BSI berhasil menumbuhkan double digit atau 14,39% (YOY) mencapai Rp329 triliun dengan fokus pembiayaan Konsumer. Meski tumbuh signifikan, secara kualitas pembiayaan yang disalurkan cukup sehat dengan indikasi Non-Performing Financing (NPF) gross 1,8% membaik dari 1,88% periode sebelumnya. Adapun NPF Nett di sekitar 0,38%. Mayoritas pembiayaan (72,37%) didistribusikan pada segmen Konsumer dan Ritel, sisanya 27,63% ke segmen wholesale.

Peningkatan Dana Murah berkontribusi terhadap penurunan biaya dana ke level 2,12% dan penajagan kualitas pembiayaan menjaga biaya CKPN di level 0,73%. Kondisi tersebut cu-

kup ideal untuk mendorong rasio laba bersih Perseroan pada Triwulan I 2026 dengan indikasi ROA 2,53% dan ROE 19,36%.

Direktur Sales and Distribution Anton Sukarna mengungkap BSI berkontribusi aktif terhadap As-tacita Pemerintah dan juga mendukung program perekonomian pemerintah melalui support terhadap MBG sebesar Rp198 miliar kepada 211 dapur MBG, penyaluran KDMP dan penyaluran KUR yang masing-masing menjangkau lebih dari 80 ribu Koperasi dan 17,732 nasabah penerima KUR. Dari sisi penyediaan rumah bersubsidi, BSI menyalurkan FLPP kuartal I sebanyak 894 nasabah. Adapun total pembiayaan rumah bersubsidi mencapai Rp5,7 triliun. Selain itu BSI juga berpartisipasi di dalam Pembiayaan Program Perumahan (KPP) untuk UMKM. ■■■■



BI Rate Berpotensi Naik, Kredit dan Cicilan Bisa Tertekan

SULTENG RAYA - Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya risiko global dinilai mulai memberi tantangan baru bagi sektor perbankan. Permata Bank memperkirakan peluang kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate masih terbuka pada semester I 2026.

Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengatakan, pelemahan rupiah yang telah menembus lebih dari 4 persen secara year-to-date menjadi salah satu faktor yang meningkatkan peluang kenaikan BI Rate.

“Kami melihat peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada semester I cukup terbuka, kemungkinan pada Mei atau Juni, sehingga BI Rate dapat naik menjadi 5 persen,” kata Faisal dalam Virtual Media Briefing PIER Economic Review Kuartal I 2026, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik, mulai dari konflik Timur Tengah, tingginya harga minyak dunia, hingga arus modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik.

Permata menilai kenaikan BI Rate nantinya dapat berdampak terhadap sektor perbankan, terutama permintaan kredit masyarakat dan dunia usaha.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, kondisi permintaan kredit saat ini sebenarnya masih relatif lemah meskipun likuiditas perbankan secara umum masih memadai.

“Salah satu penopang utama pertumbuhan kredit saat ini adalah kredit investasi. Sementara kredit modal kerja, kredit korporasi, komersial, maupun konsumsi masih relatif terbatas,” ujar Josua.

Menurut dia, perlambatan mulai terlihat pada kredit konsumsi seiring tekanan terhadap daya beli masyarakat kelas menengah. Fenomena dwntrading membuat masyarakat mulai menahan pem-

belian barang tahan lama seperti kendaraan baru. Josua mengatakan aktivitas ekonomi tetap menjadi faktor utama yang menentukan pertumbuhan kredit perbankan.

“Kalau aktivitas ekonomi membaik, konsumsi masyarakat solid, dan permintaan modal kerja meningkat, maka permintaan kredit juga otomatis akan meningkat,” katanya.

Namun, apabila kondisi ekonomi global memburuk dan tekanan terhadap rupiah berlanjut, likuiditas perbankan dinilai berpotensi semakin ketat.

Permata juga menyoroti meningkatnya penempatan dana perbankan pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Outstanding SRBI saat ini bahkan telah mencapai sekitar Rp 920 triliun.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit sektor manufaktur mulai melambat seiring tekanan pada industri. Data PMI manufaktur Indonesia pada April juga telah masuk zona kontraksi.

Head of Industry & Regional Research Permata Bank Adjie Harisandi mengatakan perlambatan industri mulai terlihat pada sektor-sektor yang berkaitan dengan barang tahan lama dan otomotif.

“Segmen menengah bawah dan entry level mengalami tekanan daya beli,” ujar Adjie.

Menurut dia, masyarakat kini cenderung beralih membeli mobil bekas dibanding kendaraan baru karena tekanan ekonomi dan tingginya harga kendaraan.

Permata menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat mempengaruhi kualitas kredit konsumsi dan pembiayaan sektor riil ke depan.

Meski demikian, Josua menegaskan kondisi likuiditas perbankan nasional saat ini masih relatif aman dan belum mengkhawatirkan.

“Sampai akhir tahun nanti, kondisi undisbursed loan akan sangat bergantung pada perkembangan aktivitas ekonomi dan sentimen usaha,” kata Josua. ■■

TAMBANG dari halaman1

Sementara itu, Wakil Ketua II Baznas Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H. Hasan Lasiatu, MM, dalam laporannya menyampaikan bahwa awalnya terdapat 105 pasangan yang diajukan untuk mengikuti Isbat Nikah, namun setelah proses verifikasi hanya 62 pasangan yang dinyatakan memenuhi syarat.

Menurutnya, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang selama ini telah menikah namun belum memiliki akta nikah resmi sehingga mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan dan bantuan negara. “Dengan pelaksanaan kegiatan ini, para peserta nantinya sudah tercatat secara

resmi dalam buku nikah dan memperoleh pengakuan hukum,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu turut menyediakan layanan pembuatan KTP dan kartu keluarga baru bagi peserta yang telah menyelesaikan proses isbat nikah. Adapun pelaksanaan khi-

tanan massal digelar di Aula Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Baznas Provinsi Sulawesi Tengah Hatamuddin Tamrin, jajaran Pengadilan Tinggi Agama Kota Palu, serta para peserta isbat nikah yang berasal dari Kota Palu. **wan**

PROYEK dari halaman1

hukum dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung layanan perpustakaan tersebut.

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Dr. Adv. Oskar Sahim Matompo, Dr. Adv. Muliadi, Adv. Abdul Manan, dan Adv. Mohamad Didi Permana, bertindak mewakili penyedia jasa Ridwan Latjinala, ST dan Oktavianus Wiro.

Dalam somasi dijelaskan, klien mereka mengerjakan proyek pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan berdasarkan kontrak Nomor 027/003/SP/PP-JK/PERPUSTAKAAN/V/2025 tertanggal 16 Mei 2025. Namun di tengah pelaksanaan hingga pasca pekerjaan rampung, muncul persoalan yang kemudian berujung pada langkah hukum berupa somasi kepada pemerint-

mencaip Rp8,7 miliar lebih. Pekerjaan disebut telah selesai dilaksanakan, namun masih terdapat sisa pembayaran yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong kepada pihak perusahaan.

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Parigi Moutong, Moko Ariyanto, SH, membenarkan adanya somasi tersebut. Meski demikian, ia mengaku belum dapat memberikan tanggapan resmi karena belum mempelajari secara menyeluruh isi surat yang dilayangkan kuasa hukum penyedia jasa.

“Saya baru kemarin dikasih tahu Pak Kadis, tapi saya belum baca semuanya,” ujar Moko saat dihubungi via telepon, Selasa (12/5/2026).

Ia mengatakan, somasi itu memang ditujukan kepada sejumlah pihak di lingkungan Pemda Parigi Moutong, termasuk Bupati, PPK, Ke-

pala Dinas Perpustakaan, dan Inspektorat.

“Informasinya memang ke Bupati, PPK, Kadis, dan Inspektorat,” katanya.

Moko mengaku baru mengetahui adanya somasi tersebut pada Senin sore ketika berada di DPRD Parigi Moutong. Karena belum membaca keseluruhan substansi surat, ia memilih belum memberikan penjelasan lebih jauh terkait langkah hukum maupun sikap pemerintah daerah.

“Saya belum bisa kasih tanggapan karena memang belum baca secara keseluruhan,” jelasnya.

Menurutnya, surat somasi diterima langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sementara dirinya hanya memperoleh informasi lanjutan dari dinas terkait.

“Secara langsung itu ke Kadis Perpustakaan. Saya dapat informasi juga dari beliau,” tambahnya.

Di tengah mencuatnya persoalan tersebut, Bupati

Parigi Moutong dikabarkan sedang berada di luar daerah sehingga belum memberikan arahan resmi kepada jajaran pemerintah daerah terkait tindak lanjut yang akan diambil.

“Pak Bupati masih di luar kota, jadi kami akan tindak lanjut petunjuk,” ujarnya.

Pemda Parigi Moutong, lanjut Moko, akan melakukan koordinasi internal bersama Dinas Perpustakaan setelah ada instruksi lebih lanjut dari pimpinan daerah.

“Kalau sudah ada perintah, tentu kami akan tindak lanjut dan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan,” pungkasnya.

Sementara itu, media ini juga berupaya mengonfirmasi salah seorang kuasa hukum penyedia jasa. Namun pihak bersangkutan belum bersedia menjelaskan secara rinci isi somasi tersebut dengan alasan masih akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan ketua tim kuasa hukum. **ai**

PLTS dari halaman1

keberlanjutan, mengutamakan efisiensi sumber daya dan meminimalisir dampak dari setiap proses produksi.

PT IMIP sebagai pengelola kawasan industri mineral terintegrasi dan berfasilitas lengkap dari hulu ke hilir, mendorong penerapan transisi energi menggunakan teknologi hijau, dilakukan melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kali ini, salah satu tenant di kawasan IMIP, PT Sumber Energi Surya Morowali (Sesmo) bakal membangun PLTS dengan kapasitas 200 MWp.

Deputi Direktur Operasional PT IMIP, Yulius Susanto mengatakan, PLTS menghasilkan listrik dari energi matahari tanpa pembakaran bahan bakar fosil saat operasional berlangsung. Emisi karbon operasionalnya sangat rendah dibanding pembangkit batu bara atau diesel. Di sisi lain, inisiatif ini menjadi respon terhadap arah kebijakan pemerintah dalam memacu pemanfaat-

an energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon.

“Pembangunan PLTS di PT Sesmo dengan luas lahan 224 ha, berkapasitas 200 MWp dan penyimpanan baterai 80 Mw, untuk mendukung teknologi energi bersih menuju industri yang berkelanjutan,” kata Yulius Susanto, Senin (11/5/2026).

PLTS berfungsi sebagai sumber energi tambahan yang secara bertahap membantu mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis batu bara. Listrik yang dihasilkan PLTS ini terutama digunakan untuk kebutuhan operasional pabrik dan perkantoran PT Sesmo. Skema pemakaian mandiri dengan penyaluran surplus memungkinkan pemanfaatan energi surya berjalan lebih optimal sekaligus membantu menstabilkan sistem kelistrikan di kawasan IMIP.

Selain itu, pemanfaatan energi surya ini diperkirakan mampu menekan konsumsi hingga puluhan

ribu ton batu bara setiap tahun, juga mengurangi emisi nitrogen oksida dan sulfur dioksida. Inisiatif ini mendukung peningkatan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) perusahaan, sebagai salah satu indikator penting daya saing industri di tingkat global.

Ke depan, pengembangan PLTS di kawasan IMIP diharapkan dapat terus ditingkatkan seiring bertambahnya kapasitas dan kemajuan teknologi penyimpanan energi. Dengan porsi energi terbarukan yang semakin besar, struktur ini diharapkan berangsur beralih menuju sistem yang lebih rendah karbon.

Untuk diketahui, sebelumnya juga di kawasan IMIP sudah ada beberapa tenant yang menerapkan teknologi hijau, antara lain PLTS kanal Fatufia dengan kapasitas Fatufia kurang lebih 1,27 MegaWatt peak (MWp), dengan spesifikasi output memiliki tegangan 4 phase 300 Kilowatt dan jumlah panel 2.190 unit.

Kedua, PLTS Atap PT DSI memiliki kapasitas terpasang mencapai 65,89 MWp.

Sebanyak 119.800 panel surya silikon monokristalin berdaya efisiensi tinggi dipasang pada area atap seluas sekitar 396.700 meter persegi. Ketiga, PT QMB New Energy Materials sedang merencanakan membangun PLTS dengan kapasitas 6 MWp.

Selain itu, di kawasan IMIP dikembangkan juga PLTU Co-Generation, antara lain dikelola oleh PT DSI dengan kapasitas 65 MWp dan PT HYNC dengan kapasitas 50 MWp.

“PLTS bukan sekadar pembangkit listrik alternatif, tetapi instrumen strategis transisi energi modern. Bagi industri, PLTS penting bukan hanya karena “hijau”, tetapi karena energi bersih mulai menjadi syarat ekonomi masa depan. Perusahaan yang lambat beradaptasi berisiko tertinggal dalam efisiensi, investasi, dan akses pasar internasional,” tegas Yulius Susanto. **wan**

PENGPROV PBSI dari halaman1

PB Djarum untuk rencana membuka kerja sama dalam pembentukan mitra PB Djarum di Sulawesi Tengah.

Sementara dalam prosesi pelantikan, Fadil Imran menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial organisasi, melainkan momentum memperkuat konsolidasi dan reformasi pembinaan bulutangkis nasional setelah evaluasi hasil Thomas dan Uber Cup 2026.

Menurutnya, prestasi bulutangkis Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada pelatnas, namun harus dimulai dari daerah melalui sistem pembinaan yang kuat dan berjenjang.

“Evaluasi yang kami lakukan hari ini harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh. PBSI harus memperkuat fondasi pembinaan dari hulu, karena masa depan bulutangkis Indonesia dimulai dari daerah. Pengprov bukan sekadar struktur organisasi, tetapi merupakan garda terdepan dalam menjangkau, membina, dan menyiapkan talenta terbaik bangsa,” ujar Fadil Imran.

Ia menekankan, keberhasilan Indonesia memperta-

hankan posisi sebagai salah satu kekuatan utama bulutangkis dunia sangat ditentukan kualitas pembinaan di tingkat daerah. Karena itu, Pengprov diminta aktif membangun kompetisi, memperkuat klub, meningkatkan kualitas pelatih, dan memperluas pencarian bibit atlet potensial.

“Ke depan kita tidak boleh hanya berorientasi pada hasil jangka pendek. Kita harus membangun ekosistem prestasi yang kuat, terukur, dan berkelanjutan. Pengprov harus menjadi bagian penting dari talent pipeline nasional menuju Asian Games, Kejuaraan Dunia hingga Olimpiade 2028,” tegasnya.

Fadil juga meminta seluruh pengurus PBSI daerah menjaga soliditas organisasi dan mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan program kerja.

“Di usia PBSI ke-75 tahun, kita harus semakin dewasa sebagai organisasi. Kita harus berani mengevaluasi, berani berbenah, dan memperkuat seluruh mata rantai pembinaan nasional. Semangat persatuan dan profesionalisme harus men-

jadi kekuatan bersama agar bulutangkis tetap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengprov PBSI Sulawesi Tengah, Ir Gufran Ahmad menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PP PBSI kepada kepengurusan baru PBSI Sulteng.

Menurutnya, amanah tersebut akan dijawab dengan kerja nyata untuk membangun pembinaan bulutangkis di Sulawesi Tengah secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

“Kami menyadari tantangan ke depan tidak ringan. Karena itu, PBSI Sulteng akan fokus memperkuat pembinaan usia dini, meningkatkan kualitas kompetisi daerah, serta memperlancar sinergi dengan klub-klub bulutangkis di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Gufran Ahmad.

Ia menambahkan, PBSI Sulteng juga berkomitmen melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami ingin Sulawesi Tengah tidak hanya men-

jadi peserta dalam setiap kejuaraan nasional, tetapi mampu melahirkan atlet yang bisa mengharumkan nama daerah dan Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah daerah, KONI, klub, pelatih dan masyarakat pecinta bulutangkis,” katanya. Gufran berharap pelantikan tersebut menjadi awal kebangkitan bulutangkis Sulawesi Tengah menuju prestasi yang lebih baik di masa mendatang.

Rangkaian acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PBSI dan Mars Patriot Olahraga, dilanjutkan pembacaan Surat Keputusan, pengucapan janji pengurus, penandatanganan berita acara, hingga penyerahan bendera PBSI kepada Ketua Pengprov sebagai simbol amanah organisasi.

Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama. Pada kesempatan yang sama, PP PBSI bersama seluruh Pengprov turut memperingati Hari Ulang Tahun PBSI ke-75 melalui pemotongan tumpeng dan doa bersama. **wan**

Erick Lobi FIFA Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028

SULTENG RAYA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah bicara ke FIFA agar tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 diberikan ke Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Erick saat bertemu dengan Gianni Infantino dalam Kongres FIFA 2026 di Vancouver, Kanada, 30 April lalu. Untuk itu Erick meminta FFI bersiap.

“Kemarin di Vancouver selama Kongres FIFA, kami bicara ‘Boleh enggak Indonesia diberi kesempatan?’ Tapi jangan sampai ketika sudah diberikan Piala Dunia, organisasinya kacau.”

“Kemarin sudah disampaikan, nanti tentu FIFA yang memutuskan,” kata Erick dalam jumpa pers setelah pembukaan Kongres FFI 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (12/5) siang.

Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar menyebut salah satu ambisi futsal saat ini adalah menjadi

tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. FFI bahagia PSSI mendukung hasrat tersebut.

“Tadi Pak Erick sudah menyampaikan harapan bisa bidding untuk Piala Dunia. Tentu ini impian kita bersama untuk yang terdekat di Piala Dunia Futsal 2028,” ujar Michael.

Per Januari 2026, Michael menyebut FFI sudah resmi menyampaikan surat ketertarikan jadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Namun FIFA belum mengumumkan daftar kandidatnya.

“Prosesnya tentu masih panjang karena keputusan ada di FIFA. Mungkin dari Pak Erick kebetulan baru dari Vancouver, jadi ada kongres di sana

FIFA, jadi harapan kami bisa mempersiapkan itu.”

“Kalaupun mungkin tidak Piala Dunia kali ini, tapi ya berikut-berikutnya. Jadi kami berharap sudah pernah tuan rumah Piala Asia, berikutnya bisa mengincar Piala Dunia juga,” kata Michael. **cnw**



DPRD SULTENG dari halaman1

Rapat itu turut dihadiri langsung Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Arnila H Moh Ali, yang sejak awal aktif mengawal proses penyusunan regulasi strategis tersebut.

Hadir dalam rapat tersebut anggota Komisi III, Abdul Rahman dan Marthen Tibe, serta Tenaga Ahli komisi III.

Sejumlah poin penting hasil komparasi di Kalimantan Timur kembali “dibedah”, mulai dari pengaturan penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang dan perkebunan, pembatasan tonase, perlindungan jalan provinsi,

hingga dorongan pembangunan jalan khusus bagi perusahaan.

Komisi III menilai, keberadaan Perda ini sangat mendesak mengingat tingginya aktivitas angkutan tambang dan perkebunan yang selama ini dinilai berpotensi mempercepat kerusakan jalan umum serta mengganggu keselamatan masyarakat.

“Raperda ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi bentuk keberpihakan terhadap keselamatan masyarakat dan perlindungan aset daerah,” ungkap salah seorang peserta rapat.

Dalam pembahasan ter-

sebut, DPRD juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat, sinkronisasi kewenangan pemerintah daerah, hingga penegakan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan penggunaan jalan.

Langkah cepat Komisi III DPRD Sulteng ini mendapat perhatian karena dilakukan secara maraton, bahkan di akhir pekan. Kondisi itu menunjukkan keseriusan DPRD dalam menghadirkan regulasi yang diharapkan mampu menjadi solusi atas polemik kendaraan bertonase besar yang selama ini kerap men-

nuai keluhan publik. **wan**

TINGKATKAN dari halaman1

“Jadi penggunaan Google for Education dapat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital sekolah,” kata Ansyar saat dihubungi awak media di Banawa, Selasa.

Ia mengemukakan saat ini sudah dilaksanakan pemetaan awal kompetensi digital sesuai standar google di Kabupaten Donggala.

“Adapemetaan dari Google, nantinya yang memenuhi kriteria akan menerapkan terlebih dahulu sistem pembelajaran digital tersebut,” ucapnya.

Ia menuturkan penggunaan Google for Education ke depan akan fokus dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama guru dan tenaga kependidikan.

“Harapannya terdapat sistem pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif di sekolah-sekolah termasuk adanya pendampingan kepada guru-guru untuk mengoptimalkan pembelajaran berbasis digital,” sebutnya.

Menurut dia, terdapat tiga sekolah sedang menerapkan digitalisasi pembelajaran berbasis artificial intel-

ligence (AI) atau kecerdasan buatan yakni Sekolah Dasar Negeri 4 Banawa, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banawa Selatan, dan SMP Negeri 1 Rio Pakawa.

“Untuk program sekolah model implementasi kecerdasan buatan ini bertujuan mempercepat transformasi pembelajaran digital bagi peserta didik di Kabupaten Donggala,” kata dia.

Berdasarkan data Disdikpora Donggala, jumlah sekolah di daerah itu sebanyak 503 sekolah terdiri dari 376 Sekolah Dasar (SD) dan 127 Sekolah Menengah Pertama (SMP). **ant**

Perhiptani Palu Dikukuhkan



PENGUKUHAN Perhiptani Kota Palu di Taipa Beach, Selasa (12/05/2026). FOTO:PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

SULTENG RAYA- Wali Kota Palu diwakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kota Palu masa bakti 2025–2030, pada Selasa (12/05/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Taipa Beach tersebut mengangkat tema “Perhiptani Unggul Menuju Swasembada Pangan Indonesia”.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPW Perhiptani Provinsi Sulawesi Tengah, Nelson Wetubun, secara resmi melantik jajaran pengurus DPD Perhiptani Kota Palu yang diketuai oleh Nanang. Membacakan sambutan tertulis Wali Kota Palu, Kadis Lukman menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru saja dikukuhkan.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Palu, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang hari ini resmi dikukuhkan.

Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian untuk kemajuan sektor pertanian di Kota Palu,” ujar Kadis Lukman.

Dalam sambutannya, wali kota melalui Kadis menegaskan bahwa penyuluh pertanian memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Menurut Kadis, penyuluh pertanian bukan hanya sebagai penyampai informasi dan teknologi pertanian, tetapi juga sebagai pendamping, motivator, sekaligus penggerak perubahan di tengah masyarakat tani.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan saat ini, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan lahan, fluktuasi harga pangan, hingga perkembangan teknologi pertanian yang begitu cepat, kehadiran penyuluh pertanian dinilai semakin penting.

Karena itu, Kadis berharap Perhiptani mampu menjadi organisasi profesi yang solid, adaptif, dan profesional dalam meningkatkan kapasitas para penyuluh pertanian di Kota Palu.

Pemerintah Kota Palu, lanjut Kadis, memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sektor pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Meskipun Kota Palu berkembang sebagai kawasan perkotaan, sektor pertanian tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan, mendukung ekonomi keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

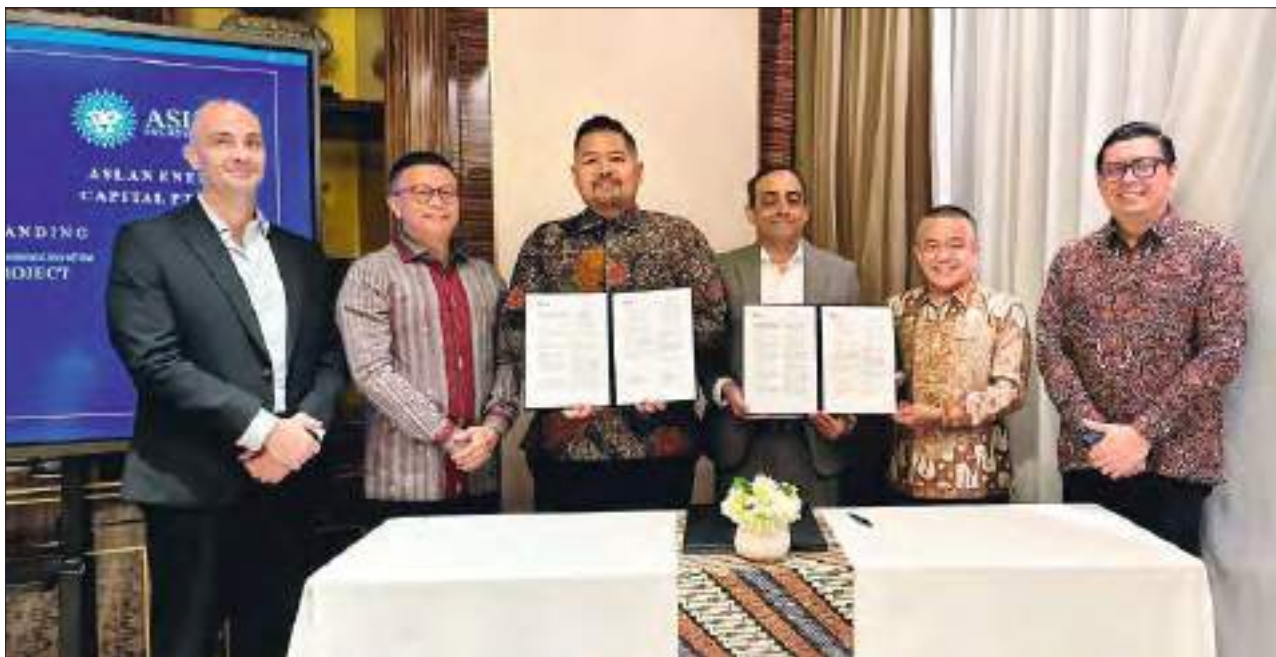
Oleh sebab itu, wali kota melalui Kadis berharap pengurus Perhiptani yang baru dapat membangun sinergi yang baik dengan pemerintah daerah, kelompok tani, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. “Mari bersama-sama menghadirkan inovasi dan solusi nyata untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertanian yang modern, maju, dan berkelanjutan,” lanjut Kadis.

Selain itu, Kadis juga mengajak seluruh penyuluh pertanian untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat integritas, dan menjaga semangat pelayanan kepada masyarakat.

“Jadilah penyuluh yang hadir di tengah petani, memahami kebutuhan mereka, serta mampu menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan,” pesan Kadis.

Kadis meyakini, dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi yang kuat, Perhiptani Kota Palu akan mampu memberikan kontribusi besar dalam mendukung pembangunan pertanian serta mewujudkan Kota Palu yang semakin maju dan sejahtera. ABS

Pabrik BESS Segera Dibangun di KEK Palu



MoU antara pihak KEK Palu bersama perusahaan energi hijau asal Singapura, Aslan Energy Capital PTE LTD dalam pengembangan BESS, pada Senin (11/05/2026) di Jakarta. FOTO: IST

SULTENG RAYA- Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menghadiri sekaligus menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pihak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu bersama perusahaan energi hijau asal Singapura, Aslan Energy Capital PTE LTD, pada Senin (11/05/2026) di Jakarta.

Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam pengembangan investasi energi hijau di Kota Palu melalui pembangunan Battery Energy Storage System (BESS) dan Terminal LNG di kawasan KEK Palu.

Nilai investasi yang digelontorkan oleh Aslan Energy Capital PTE LTD mencapai

1,73 miliar USD atau setara sekitar Rp30 triliun.

Investasi besar tersebut direncanakan akan dikembangkan secara bertahap dengan penggunaan lahan seluas 40 hektar di kawasan KEK Palu.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang menyampaikan bahwa investasi tersebut di-

proyeksikan mampu membuka sekitar 1.300 lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur KEK Palu, Sony Panukma Widianto menjelaskan bahwa selain menyerap 1.300 tenaga kerja secara langsung, proyek tersebut juga diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penciptaan sekitar 3.000 peluang kerja tidak langsung dari rantai pasok yang akan dibangun.

“Ini menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efek berganda dari investasi yang masuk,” ungkap Sony.

Di kesempatan yang sama, CEO Aslan Energy

Capital, Muthu Chezhan mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempelajari potensi Kota Palu selama hampir dua tahun terakhir.

Menurutnya, Palu memiliki posisi yang sangat strategis karena berada pada jalur akses perdagangan internasional serta memiliki potensi besar untuk pengembangan industri energi hijau di masa mendatang.

Wali Kota Palu menyambut baik kerja sama tersebut dan berharap investasi yang masuk dapat menjadi momentum percepatan pembangunan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi KEK Palu sebagai kawasan industri dan perdagangan yang kompetitif di kawasan timur Indonesia. ABS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU



Moh Amin Parakkasi, S.Ag. M.Hi
Ketua BPH



Prof. Dr. H. Rajindra Rum, SE., MM
Rektor



Dr. Sudirman, S.KM M. Kes
Wakil Rektor I



Dr. Burhanuddin SE, M. M
Wakil Rektor II



Dr. Budiman, S.Pd., M.Kes
Warek III



Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H, M.H
Warek IV

Akreditasi Unggul, Rektor Unismuh Beri Bonus Dekan FISIP



REKTOR Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM menyerahkan bonus kepada Dekan FISIP Unismuh Palu, Dr. Muhamad Dasril, pada Rabu (6/5/2026). FOTO: KIRIMAN

SULTENG RAYA – Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM memberikan apresiasi terhadap capaian akreditasi Unggul yang diraih oleh Program Studi (Prodi) Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Palu.

Sebagai bentuk penghargaan, Rektor Rajindra menyerahkan bonus kepada Dekan FISIP Unismuh Palu, Dr. Muhamad Dasril, pada Rabu (6/5/2026).

Penyerahan tersebut turut disaksikan oleh jajaran pimpinan universitas dan fakultas serta Sekretaris PW

Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Mulksu Kisman, S.Ag. M.Ag.

Rektor menyebut, pemberian bonus tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga dorongan moral bagi program studi lain agar terus meningkatkan kualitas dan mampu meraih akredi-

tasi Unggul.

Menurutnya, Prodi ilmu Administrasi Negara menjadi program studi ketiga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu yang berhasil meraih akreditasi tertinggi, setelah sebelumnya dicapai oleh Prodi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat.

Sementara itu, Dekan FISIP Unismuh Palu, Dr. Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan penuh dari pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, serta

seluruh mahasiswa.

Ia menegaskan, capaian akreditasi Unggul merupakan hasil kerja kolektif yang dibangun melalui komitmen peningkatan mutu akademik, penguatan tata kelola program studi, serta konsistensi dalam menjalankan standar pendidikan tinggi.

“Ini bukan capaian individu, melainkan hasil kerja bersama seluruh civitas akademik.

Kami berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ini agar tetap unggul dan berdaya saing,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dasril men-

ambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan inovasi dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat jejaring kerja sama dengan berbagai pihak.

Dengan capaian ini, FISIP Unismuh Palu diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan pendidikan ilmu administrasi negara di kawasan Sulawesi Tengah, sekaligus berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. ENG

